IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MEKAR BARU KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA

Emelia Dewi Sukowati¹, Dra. Februati Trimurni, M.Si., Ph.D²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹Emelliadewi44@gmail.com, ²februati@usu.ac.id

Abstract: *the new blooming village apparatus has formed a Village Owned Enterprise (BUMDes) as a reference in improving the economy of rural communities. However, in implementing the BUMDES program there are still several problems such as the lack of information provided by village officials to the community in managing BUMDes, lack of outreach to the community, lack of supervision so that BUMDes does not run optimally and lack of government assistance in providing solutions to problems faced by BUMDes. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Village Owned Enterprises (BUMDes) program in Mekar Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively using the implementation theory of Van Metter and Van. The results of the study show that the Standards and Objectives of the BUMDes program are not clear because the local government has not formulated a clear implementation process. Resources are still lacking such as competent Human Resources in managing BUMDes. The communication of the Executing Agency built by BUMDes is still lacking. The characteristics of the Executing Agency do not show a lack of invitation to the public to participate in BUMDes activities. The economic environment influences the community to choose to participate in the BUMDes program. The attitude of Mekar Baru BUMDes executives is slow in responding to community needs. The attitude of the executor as implementer is also not fast and responsive in resolving the problems faced by BUMDes Mekar Baru, this is due to the lack of funds they have.*

Keywords: *Implementation; Program and BUMDes*

Abstrak: perangkat desa mekar baru telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai acuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun didalam penerepan program BUMDES ini masih terdapat beberap permasalahan-permasalahan di dalamnya seperti kurangnya informasi yang diberikan perangkat desa kepada masyarakat dalam mengelola BUMDes, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga BUMDes tidak berjalan dengan optimal dan kurangnya bantuan pemerintah dalam memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi BUMDes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu bara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori implementasi dari Van Metter dan Van. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar dan Tujuan dari program BUMDes tidak jelas karena belum dirumuskan oleh pemerintahan daerah secara jelas proses pelaksanaannya. Sumber Daya masih kurang seperti Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam mengelola BUMDes. Komunikasi Badan Pelaksana yang dibangun BUMDes masih kurang. Karakteristik Badan Pelaksana yang tidak menunjukkan kurangnya ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan BUMDes. Lingkungan Ekonomi mempengaruhi masyarakat untuk memilih ikut berpartisipasi dalam program BUMDes.

Sikap Pelaksana BUMDes Mekar Baru yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Sikap Pelaksana sebagai implementor juga tidak cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BUMDes Mekar Baru, hal ini diakibatkan kurangnya biaya yang dimiliki.

Kata kunci: Implementasi; Program dan BUMDes.

PENDAHULUAN

Kebijakan program BUMDES di Indonesia sudah dijalankan sejak tahun 2004 namun di dalam pengimplementasiannya saat ini belum berjalan dengan baik masih terdapat permasalahan-permasalahan didalam menjalankan program BUMDES itu sendiri sehingga menyebabkan program BUMDES belum dapat dikatakan berhasil 100%.

Beberapa penyebab gagalnya BUMDes dikarenakan lemahnya pengawasan dan pembinaan dinas terkait. Pendampingan dari dinas yang dilakukan secara terus-menerus akan meminimalisir kesalahan, seperti yang terjadi pada BUMDes di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur BUMDes ini hanya mampu meraih keuntungan senilai 7 juta rupiah dari program air minum dalam kemasan sementara pengelola BUMDes Desa Penajam Paser Utara menargetkan omset sebesar 50 juta untuk tahun pertama pengoperasiannya.

Menurut sumut.antaranews.com, Provinsi Sumatera Utara memiliki 2.921 BUMDes namun yang berklasifikasi maju masih sangat sedikit yakni sebanyak 21 usaha dan 124 usaha berklasifikasi berkembang. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Haspan Sofian perlu kerja keras dan dukungan banyak pihak untuk memajukan BUMDes agar perekonomian Sumut semakin cepat bergerak dan masih membutuhkan pendampingan termasuk dalam pemasaran produk secara digital. Masalah yang terjadi pada kebanyakan Badan Usaha Milik Desa juga terjadi pada BUMDes Mekar Baru yang mana akar masalah tersebut diakibatkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah

untuk memajukan BUMDes Mekar Baru seperti tidak adanya pelatihan yang diberikan untuk masyarakat dalam mengelola BUMDes, Kurangnya bantuan pemerintah dalam memberikan solusi untuk masalah BUMDes dan Minimnya Pengawasan yang dilakukan sehingga BUMDes tidak berjalan dengan Optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target dan merosotnya Realisasi BUMDes seperti tabel dibawah ini.

Tabel. Target dan Realisasi Dana BUMDes Desa Mekar Baru

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp.35.000.000	Rp.5.353.000
2020	Rp.40.000.000	Rp.12.341.000
Status	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat pada tahun 2019 sampai ke 2020 target pencapai BUMDes Mekar Baru dari Program penggilingan daging tidak pernah tercapai bahkan terlalu jauh dari target yang diinginkan. Pada 2019 pengelola BUMDes Mekar Baru yang sudah menerima bantuan dari pemerintah langsung menargetkan sebesar 35 juta rupiah uang yang bisa dihasilkan dari mesin pengolahan daging. Namun hasilnya jauh dari yang ditargetkan. Pada 2019 adalah realisasi yang dihasilkan adalah senilai Rp. 5.353.000. Sedangkan untuk tahun 2020 pengelola BUMDes Desa Mekar Baru menargetkan biasa menghasilkan 40 juta selama 1 tahun, namun realisasinya Rp.12.341.000. Jika dilihat selama 2 tahun pengadaanya program BUMDes Mekar Baru belum optimal dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di Desa Mekar Baru.

Artinya kebijakan BUMDes di Desa Mekar Baru realisasinya jauh dari target yang ditentukan dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

maksimal kepada BUMDes Desa Perangkat Desa Mekar Baru sudah memiliki beberapa rencana untuk mengelola bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, namun karena tidak adanya penyuluhan atau survey dari pemerintah pusat ke Desa Mekar baru, sehingga membuat perangkat Desa Mekar Baru memilih sendiri program yang akan dibuat untuk masyarakat, Pengadaan mesin Program penggilingan daging adalah hasil diskusi para perangkat desa atas pemberian bantuan pemerintah yang terbatas ke Desa Mekar Baru.

Alasan bantuan BUMDes di wujudkan dalam bentuk program penggilingan daging dikarenakan program penggilingan daging merupakan mesin yang serbaguna dan biasa dimanfaatkan untuk mengubah daging mentah agar lebih bernilai ekonomis seperti untuk pembuatan bakso, daging cincang dan lainnya. Menurut pengelola BUMDes Mekar Baru alasan kenapa dana BUMDes digunakan untuk membeli mesin Program penggilingan daging adalah karena para perangkat desa ingin agar masyarakat Desa Mekar Baru memiliki penghasilan lain selain yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas. Sehingga tidak bergantung pada hanya satu mata pencaharian dengan memiliki sumber pendapatan lain kepada masyarakat maka akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun setelah berjalan selama dua tahun mesin Program penggilingan daging tersebut disediakan oleh perangkat Desa Mekar Baru program ini tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan beberapa hal yang membuat tidak berminatnya warga Desa Mekar Baru dengan program BUMDes tersebut. Mesin Program penggilingan daging yang dibeli pada tahun 2019 dengan dana BUMDes senilai 20 juta menjadi tidak digunakan secara optimal, dan berakhir dengan disewakan kepada pengusaha ayam dengan biaya Rp 500.000/bulan. Selama dua tahun (2019-

2020) pengadaan mesin Program penggilingan daging yang disediakan oleh BUMDes Mekar Baru tidak pernah mencapai target yang di tentukan. Realisasinya jauh di bawah target yang diharapkan. Bahkan sampai merugi karena ada biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Dari Permasalahan yang trlah penulis kemukakan di atas dan beberapa penelitian terhadulu maka mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Mekar Baru Kabupaten Batu Bara, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di De Dsa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan menggunakan kutipan, kalimat naratif, dialog antar tokoh. Pada metode ini tidak menggunakan angka.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa, Ketua dan Pengelola BUMDes, BPD Mekar Baru, LPM Desa Mekar Baru, Masyarakat Desa yang tergabung dan tidak tergabung dengan BUMDes. Selain itu data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi dan penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal dan sumber-sumber relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kebijakan yang dibuat harus bisa berjalan dengan baik yang sesuai dengan perencanaan dan rancangan para pembuat kebijakan, dalam penelitian ini

untuk mengukur apakah kebijakan BUMDes Mekar Baru berjalan sesuai dengan harapan para pembuatnya

Pendirian BUMDes di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Batu Bara hal ini di dasari atas desakan oleh Bupati Batu Bara kepada setiap perangkat desa yang ada dinaungannya untuk segera membentuk BUMDes karena ingin menjalankan Perda No 37 tentang permusyawaratan desa yang sudah dibentuk semenjak 26 Mei Tahun 2009 yang lalu, walaupun Bupati Batu Bara melakukan tindakan pemaksaan kepada setiap kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara untuk membentuk BUMDes tapi pemerintahan Kabupaten Batu Bara memberikan kebebasan kepada setiap kepala desa untuk membentuk BUMDes-nya sesuai dengan karakteristik dan kemampuan dari desa tersebut.

Bedasarkan kebebasan dari pemerintahan pusat tersebut maka pemerintah Desa Mekar Baru membentuk BUMDesnya sesuai dengan program yang dirasa sesuai dengan keadaan Desa Mekar Baru, jadi bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Batu Bara hanya menyediakan izin dan menyalurkan dana kepada setiap desa yang membentuk BUMDes-nya sendiri. Kebebasan dalam membentuk BUMDes yang diberikan oleh pemerintan pusat membuat pemerintahan Desa Mekar Baru membentuk BUMDesnya dengan didasari oleh musyawarah warga yang dianggap berkompeten dengan para perangkat desa, atas hasil musyawarah tersebut dipililah program penggilingan daging sebagai BUMDes Mekar Baru. Sehingga dari musyawarah tersebut terbentuklah peraturan desa (Perdes) yang dikhususkan untuk kelancaran program BUMDes Mekar Baru.

Sumber-sumber Kebijakan

Penerapan kebijakan sangat memerlukan sokongan dari berbagai sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana sehingga kebijakan yang akan dibentuk bisa dijalankan

dengan optimal. Dalam menjalankan program BumDes yang sudah dibentuk pemerintah Desa Mekar Baru sudah memikirkan sebelumnya sumber daya manusia yang mereka miliki untuk menjalankan BumDes ini, namun harus diakui bahwa sumber daya manusia (SDM) Desa Mekar Baru dirasa belum memadai untuk menjalankan BumDes dengan skala nasional. Di desa mekar baru sumber daya yang sangat perlu digunakan untuk menunjang penerpan kebijakan BUMDES ADALAH perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri, tanpa adanya manusia ksuatu keijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Namun di dalam penerapan nya perangkat desa maupun masyarakat desa mekar baru belum dapat menjalankan program BUMDES ini.

Dalam perekrutan pengurus di sesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, akan tetapi kenyataannya dilapangan para unit pelaksana merasa kekurangan orang untuk membantu pekerjaan mereka memang pada awal pelaksanaannya membutuhkan orang yang benar-benar bekerja tanpa dibayar untuk kemajuan desa, kekurangan sumber daya manusia yang ada di BumDes Mekar Baru selain dari pengurus dan pemerintahan desa yang hanya mengajukan beberapa nama, SDM yang direkrutpun harus mau menjadi relawan terlebih dahulu, artinya dalam pelaksanaannya SDM BumDes Mekar Baru harus bersedia kerja tanpa dibayar dan kekurangan SDM yang terjadi memang disebabkan oleh pelaksana yang hanya merekrut sedikit orang dan tidak mengeluarkan biaya untuk menggaji SDM yang menjadi bagian dari BumDes Mekar Baru.

Selain sumber daya manusia yang terbilang minim sumber daya alam yang dimiliki Desa Mekar Baru juga terbilang miskin, dikarenakan Desa Mekar Baru merupakan desa yang dijadikan sebagai lahan sawit sehingga tidak banyak yang bisa di jadikan produk produk olah yang bersumber dari alam sekitar desa, sehinggann pengelola BumDes Mekar Baru harus mengucurkan dana untuk membuat

program BumDes yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Mekar Baru.

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antar perangkat desa selaku implementor di dalam penerapan kebijakan BUMDES di Desa Mekar baru dan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Seperti tidak adanya komunikasi terkait program-program BUMDES yang akan di jalankan, kurang terbukanya informasi yang diberikan para perangkat desa kepada masyarakat juga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat itu sendiri, berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa mekar baru: “kalau untuk informasi dari perangkat desa keada kami ini tentang BUMDES itu tidak ada mereka diam-dam saja. Jadi kita ini sebagai masyarakat jga tidak tahu apa-apa saja program BUMDES yang akan dijalankan”

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat dikatakan kurang terbukanya informasi yang diberikan perangkat desa kepada masyarakat menimbulkan kecurigaan, selain itu jika suatu kebijakan ingin berhasil maka komunikasi yang ada di dalamnya juga harus sudah berjalan dengan baik.

Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Sikap para pelaksana BUMDES di Desa mekar baru juga terkesan tidak aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga banyak dari masyarakat juga terkesan cuek di dalam kegiatan bumdes ini, hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang mengatakan:

“para perangkat desa itu kayak terkesan malas untuk ngasih informasi sama kami tentang BUMDES ini, kami juga jadi agak kurang peduli juga karena kami merasa tidak di ikut sertakan sama perangkat desa”

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dilihat dari lingkungan ekonomi masyarakat desa mekar baru tergolong ke

ekonomi menengah kebawah, dengan adanya BUMDES ini juga kurang memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa hal ini terjadi karena sudah adanya program penggilingan daging yang sudah disediakan malah disewakan kepada pedagang bakso di Desa Mekar Baru, dengan biaya Rp.500.000/Bulan. Desa Mekar baru yang tidak memiliki banyak sumber daya selain sawit dan sumber daya manusia ekonomi yang ada di lingkungan Desa Mekar Baru bisa dibilang tidak baik. Dikarenakan masyarakat Desa Mekar Baru tidak memiliki lahan, atau pekerjaan lain untuk dilakukan..

Kecendrungan atau Sikap Pelaksana

Baik dari perangkat desa maupun masyarakat desa mekar baru sendiri cenderung kurang ikut memajukan program BUMDES itu sendiri. Terlihat dari sikap malas-malasan dari perangkat desa, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dan kurang berperan aktifnya masyarakat dalam kegiatan ini mengakibatkan belum berhasil kebijakan program bumdes di desa mekar baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Program BUMDes Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dibentuk karena adanya desakan dari Bupati Batu Bara untuk menjalankan program BUMDES. sehingga atas dasar pemaksaan tersebut desa desa yang berada di wilayah kabupaten Batu Bara harus segera membentuk BUMDes. Mesin penggiling daging dipilih karena desa Mekar Baru tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi dan jumlah dana yang diturunkan hanya bisa membeli mesin tersebut.

BUMDes Mekar Baru sudah direncanakan dengan sangat baik, kendala-kendala yang dihadapi pengelola BUMDes sebenarnya tidak signifikan

karena hanya dibutuhkan niatan dari anggota dan perubahan mindset dari masyarakat agar BUMDes ini bisa berjalan dengan baik Pengelola BUMDes Mekar Baru sudah menyediakan, program penggilingan daging sebagai bentuk penyaluran Dana BUMDes, tujuan mesin ini diadakan adalah untuk membantu masyarakat Desa Mekar baru yang kebanyakan adalah buruh tani, dengan adanya mesin ini diharapkan masyarakat akan lebih terjamin pendapatannya, namun masyarakat tidak menunjukkan minat untuk mengelola program penggilingan daging ini, Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi program BUMDes secara umum sudah tidak berjalan dengan baik terlihat dari tidak adanya perubahan Ekonomi dari masyarakat Desa Mekar Baru, Masyarakat Desa Mekar Baru seperti tidak memiliki kemampuan lain, selain menjadi buruh sawit. Pelaksanaan BUMDes dibutuhkan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Pemerintah Desa Mekar Baru relevan dengan masalah BUMDes yang belum membentuk kebijakan daerah terkait BUMDes, Organisasi/lembaga desa dan lembaga lain yang relevan, serta tentunya masyarakat Desa Mekar Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta Akbar, Usman 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara
- Amirin, Tatang M. 2015. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Ibrahim. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudasir, 2013, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa Publishing,
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2014, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Mulyadi, Deddy. 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta
- Sholichin Abdul, Wahab S. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri. 2008. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES
- Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Winarno. (2014). Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju yuridis. Bandung: Penerbit Alfabeta